

PENERAPAN ELEKTRONIK GOVERNMENT SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN [SAPK] PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Wahyu Alam,¹ Asrifai,^{2*} Rusmawaty Bte, Rusdin^{3*}

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

*Correspondence :

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Hardware, Software, Human Resource, Data dan Info, Struktur Organisasi, Komunikasi, Sikap Para Pelaksana.

Received. : 12 Juli

Revised. : 16 Juli

Accepted : 19 Juli

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Elektronik government dalam Sistem Aplikasi SAPK di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi tengah mengacu pada pengukuran Penerapan Elektronik Government menurut Rianto dan lestari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran secara kontekstual dan memahami secara mendalam dari proses penerapan Sistem Pelayanan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di Kantor BKD Provinsi Sulawesi tengah. Belum Efektif. Dengan model penilaian Penerapan dari Rianto Dan Letari sebagai alat analisis. Terdapat lima kriteria penilaian yang belum terpenuhi dalam penerapannya yaitu : (1) *Hardware*, Point ini belum terpenuhi karena pada instansi tersebut jumlah pegawai yang mampu mengoperasikan Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian (SAPK) dengan teknologi yang tersedia masih terbatas, sehingga pada mula penerapan Elektronik Government ini pada program SAPK ini sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini pegawai BKD masih kurang beradaptasi (2) *Software*, kemampuan pegawai BKD mengelolah data-data pegawai belum *up to date* sekalipun ada pernyataan dari informan telah melakukan sosialisasi tentang Sistem ini. (3) *Data dan Info*, Data yang dihasilkan BKD dalam menjalankan system Administrasi Pelayanan kepegawaian yang berbasis online ini masih belum sesuai harapan karena informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data kepegawaian belum akurat dan relevan. (4) *Komunikasi*, pada tahun tahun awal penerapan SAPK belum optimal karena kendala komunikasi berbagai pihak yang bersangkutan antara pihak BKD dan para PNS di setiap (5) *Sikap Para Pelaksana*, Respon para pengguna dari penerapan SAPK di BKD Provinsi Sulawesi tengah penerapan SAPK ini belum terealisasi dengan baik di berbagai bidang yang ada di BKD provinsi Sulawesi Tengah.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Implementation of Electronic Government in the SAPK Application System at the Central Sulawesi Province Regional Civil Service Agency Office referring to the measurement of Electronic Government Implementation according to Rianto and Sustainable. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, with the aim of obtaining a contextual picture and understanding in depth the process of implementing the Personnel Service System implemented by the Central Sulawesi Province Regional Personnel Agency. The results of this research indicate that the implementation of the Personnel Service Application System in the BKD Office of Central Sulawesi Province. Not Effective Yet. With the Application assessment model from Rianto and Letari as an analytical tool. There are five assessment criteria that have not been met in

its implementation, namely: (1) Hardware. This point has not been met because in this agency the number of employees who are able to operate the Personnel Management Application System (SAPK) with the available technology is still limited, so at the beginning the implementation of Electronic Government in this SAPK program from 2013 until now BKD employees are still not adapting (2) Software, the ability of BKD employees to manage employee data is not yet up to date even though there are statements from informants that they have carried out socialization about this system. (3) Data and Information, the data produced by BKD in running the online-based personnel service administration system is still not up to expectations because the information produced from managing personnel data is not yet accurate and relevant. (4) Communication, in the early years of SAPK implementation was not optimal due to communication problems between various parties concerned between the BKD and civil servants in each (5) Attitude of the Implementers, the response of users from the implementation of SAPK in the Sulawesi Province BKD in the middle of implementing SAPK was not yet well realized in various fields in the BKD of Central Sulawesi province.

Pendahuluan

Pada penerapan *Elektronik Government* suatu upaya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, Penerapan *Elektronik Government* dapat membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas instansi pemerintahan dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat serta mengurangi birokrasi yang berlebihan.

Pelaksanaan *Elektronik Government* untuk menunjang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan *Elektronik Government*. Elektronik melibatkan pengguna teknologi digital untuk mengubah cara kerja, berinteraksi dan melakukan sehari-hari baik di sector publik maupun swasta. *Elektronik Government* melibatkan pengguna teknologi digital atau aplikasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik, administrasi pemerintahan, dan interaksi dengan masyarakat maupun pegawai contohnya termasuk penerapan *system Elektronik Government*, pelayanan *online*, pembuatan kebijakan berbasis data, pengguna aplikasi teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi public. Elektronik proses penerimaan dan pengelolaan dokumen dalam konteks kepegawaian dapat memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi waktu. (setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_).

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar

Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian *On-Line* (SAPK *On-Line*). Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) merupakan program Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui program yang meliputi sistem aplikasi pengenalan, pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun, mekanisme peremajaan (*up date*) data, aplikasi unit organisasi dan formasi kepegawian.

Tujuan dari program ini adalah mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dan mutakhir dengan harapan terwujudnya data pegawai negeri sipil (PNS) yang akurat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara (SAPK) secara *On-line*. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya penggunaan internet telah membawa setiap individu dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi dengan menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik. Sehingga dalam kehidupan organisasi dituntut ketersediaan suatu sistem informasi dengan dukungan dari fasilitas komputer, data atau informasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap dan mampu sebagai hal utama dalam penerapan manajemen modern. (Humas.menpan.go.id/site/).

Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, khususnya Pasal 34 (ayat 2), yakni perlu diselenggarakan dan dipelihara sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan tujuan agar Badan Kepegawaian Daerah dapat memiliki kemampuan mengelola serta memberikan berbagai informasi tentang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, serta mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang Kepegawaian, telah membuat dan mengembangkan *website*. Para pegawai dapat mengakses alamat *website* tersebut melalui beberapa fasilitas yang disediakan oleh BKD, salah satunya yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Pemberdayaan komputer perangkat keras/lunak khusus untuk (SAPK) berbasis internet merupakan salah satu program strategis dari BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) telah diterapkan pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pegawai dalam proses pengurusan

Administrasi dan manajemen kepegawaian yang berbasis Online. Akan tetapi dalam proses penerapannya di Kantor BKD ini masih kurang mendapatkan respon dari para pegawai untuk menggunakan aplikasi. Sehingga pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis Aplikasi ini belum bisa dikatakan efektif karena masih ada kendala dalam penerapannya.

Belum maksimalnya penerapan *elektronik government* dalam program aplikasi SAPK ini adalah sarana dan prasarana pendukung serta sosialisasi kepada para pegawai yang ada di Kantor BKD Provinsi Sulawesi tengah masih kurang. Sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan para pegawai mengenai cara pengoprasian Sistem Aplikasi Administrasi Kepegawaian berbasis internet ini. Bukan hanya itu masalah juga ditemui pada saat ingin *login* (masuk) dalam Aplikasi SAPK ini dimana masih lambat dalam prosesnya diakibatkan oleh kualitas jaringan yang kurang memadai dalam lingkungan penggunaannya sehingga pada penerapan Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian ini masih terkendala. Salah satu masalah yang sering ditemui dari pengamatan penulis terdapat pada pengurusan pensiun yang diajukan pegawai negeri sipil sering terjadi adalah keterlambatan yang diakibatkan lemahnya jaringan yang digunakan untuk mengakses Aplikasi ini. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi para pengaju pensiun dalam pengambilan Surat Keputusan (SK) penetapan pensiun yang memakan waktu yang lama bahkan tidak menutup kemungkinan harus menunggu berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan.

Dengan adanya permasalahan seperti ini akan berpengaruh pada pencairan gaji pensiun pegawai negeri sipil. Karena aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2003 bahwa gaji pensiun pegawai negeri sipil (PNS) bisa dicairkan oleh negara jika pegawai negeri sipil (PNS) tersebut sudah dikeluarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah. Jika surat keputusan (SK) keluar maka uang gaji akan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang disesuaikan pada golongannya yang diatur pada peraturan pemerintah nomor 30 Tahun 2015 Tentang Gaji Pokok Sebagai Dasar Pensiun. Bagaimana kemudian jika Aplikasi ini mengalami kendala seperti yang jelaskan diatas akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung, tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi proses pelayanan administrasi kepegawaian.

Adanya masalah tersebut maka penerapan SAPK belum terlaksana secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal seperti ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, untuk itu diperlukan peningkatan dan pemantapan serta pengelolaan system aplikasi pelayanan kepegawaian yang efektif mengingat Aplikasi ini adalah sebuah inovasi dalam mendukung penyajian data dan informasi kepegawaian secara berkala. Maka dari itu perlunya pengelolaan yang baik dalam penerapan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) oleh pihak instansi terkait khususnya di Kantor BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Serta bagaimana kemudian merubah persepsi dan harapan para pegawai dalam penggunaan layanan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) ini dapat memberikan peningkatan kualitas layanan kepegawaian. Berdasarkan fenomena yang dipaparkan diatas yang belum sesuai dengan apa yang ada di

lapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah riset ilmiah untuk mengetahui lebih jauh tentang “Implementasi system aplikasi pengelolaan kepegawaian pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Elektronik Government Sistem Pengelolaan Kepegawaian Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Konsep Elektronik Government secara teoritik dipahami sebagai upaya untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga dapat menjadi lebih efektif efisien dan transparan yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan reformasi birokrasi, baik itu pembenahan kelembagaan, sumberdaya manusia dan sistem. Penggunaan TIK dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah, juga memperluas partisipasi publik. Pendayagunaan Elektronik Government bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

Grant menyatakan Elektronik Government merupakan penyediaan layanan (*service*) pemerintah dengan menggunakan TIK, khususnya melalui *Internet*. Tujuan mempermudah dalam pelayanan berbasis *online*. Penerapan E-goverment sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria seperti yang diungkapkan oleh Arianto dan lestari memberikan batasan terkait penerapan elektronik government secara ideal cakupannya adalah: *Hardware, software, human resource, data dan info, struktur organisasi, komunikasi dan sikap pelaksana*.

Pengukuran tingkat keberhasilan dari penerapan E-Gov pada Satuan Kerja Perangkat Daerah secara formal dalam suatu Instansi Pemerintah Daerah, maka akan diperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kerja secara baik serta diperolehnya pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dilingkungan pemerintahan.

Beberapa aspek yang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penerapan elektronik government (aplikasi SAPK) di kantor BKD Povinsi sulawesi tengah untuk diketahui keberhasilannya dalam mengelola administrasi kepegawaian secara online. Dari hasil penelitian elektronik government di Kantor BKD Povinsi sulawesi tengah diharapkan dapat mendeskripsikan secara factual Adapun hasil penelitian ini penulis akan deskripsikan sebagai berikut:

1. *Hardware (Perangkat Keras)*

Pemberdayaan komputer perangkat keras/ lunak khusus untuk (SAPK) berbasis internet merupakan salah satu program strategis dari BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian(SAPK) telah diterapkan pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pegawai dalam proses pengurusan Administrasi dan manajemen kepegawaian yang berbasis Online.

Sebuah aplikasi Elektronik Government membutuhkan sebuah jaringan LAN (*Local Area Networking*), yaitu jaringan menggunakan kabel, yang biasanya digunakan secara intern. Serta WAN (*Wide Area Networking*) yaitu jaringan tanpa kabel yang biasanya digunakan untuk berhubungan antar instansi. Atau bahkan jaringan global (internet). Untuk jenis aplikasi yang terakhir ini biasanya membutuhkan banyak komputer seperti *database server, application server, proxy server, firewall server, email server, domain server*, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Anita Hardaningsih, S.Sos., M.Si Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah terkait Hardware dalam mendukung program aplikasi SAPK di kantor BKD pada saat ini.

“...Kalau bicara soal *hardware* atau perangkat keras yang digunakan para pegawai untuk melakukan pelayanan data para PNS kemampuan staf yang ada di kantor BKD saya pikir sudah mampu mengoperasikan aplikasi ini dan kami juga punya operator di masing-masing bagian untuk melayani pegawai yang ingin mengurus data...”

Kemampuan pegawai beradaptasi dengan perangkat keras sebagai sarana pendukung dalam menggunakan aplikasi sangat diperlukan karena kondisi lingkungan organisasi dan perangkat yang dibutuhkan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Dalam hal penerapan SAPK ini diharapkan bisa lebih meringankan pekerjaan pemerintah dalam mengelola data-data pegawai agar lebih efektif dan efisien.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Fernando S.Kom Operator I Bidang Operator SAPK, menjelaskan sebagai berikut :

“...Perangkat yang digunakan terdapat dalam Aplikasi SAPK untuk mengolah data pegawai menggunakan perangkat teknologi, sejak tahun 2013, sistem ini sudah dikelola oleh operator yang ada di kantor BKD pengelola data menggunakan perangkat lunak dan keras, kalau untuk beradaptasi saya kira sudah cukup tersedia dan pegawai atau operator sudah beradaptasi...”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) dalam melaksanakan pengimputan data pegawai sejak tahun 2013 dan bisa dikatakan bahwa pegawai BKD sudah beradaptasi dan didukung dengan perangkat keras yang sudah memadai pada penggunaan aplikasi ini sehingga pegawai yang ada di BKD

sudah terbiasa melakukan pelayanan kepegawaian dengan menggunakan system Aplikasi ini.

Akan tetapi pendapat yang berbeda muncul dari Ibu Widya S.Kom Operator II Bidang SAPK Berikut hasil wawancara :

“...Perangkat keras yang digunakan memang sudah bisa dikatakan sudah cukup memadai dalam Sistem Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) memang kami sudah menggunakannya sejak tahun 2013, sehingga sistem ini sangat membantu dalam pengolahan data pegawai, namun penggunaan perangkat pada tahun-tahun berikutnya kurang lancar karena kendala dana untuk pembaharuan perangkat keras yang digunakan, jadi aplikasi kami begitu-begitu saja. kemudian Kendala lainnya yaitu terlambatnya SKPD dalam pemberian data pegawainya ke kami, saya fikir kondisi tersebut karena masih adanya pegawai yang belum menguasai Sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis online ini...”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Lekasanda S.Kom Kasubbag Kepegawaian menjelaskan sebagai berikut :

“...Sejak Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian (SAPK) di terapkan masih ada kendala dalam pembagian perangkat keras yang digunakan seperti komputer,wifi yang belum mendukung penerapan pelayanan (SAPK) ini,maka dampaknya dalam pengolahan data pegawai masih banyak yang keliru hingga sampai saat ini saya masih sedikit-sedikit turun langsung dalam pengolahan data apabila ada hal yang kurang dimengerti oleh staff pengolah data jadi kalau dibilang sudah beradaptasi saya rasa pegawai di BKD ini belum semuanya bisa beradaptasi dengan perangkat keras yang disediakan dan sistem yang ada di dalamnya...”

Pernyataan informan diatas memberikan gambaran bahwa Ketidak mampuan pegawai beradaptasi pada perangkat yang sudah disediakan, penerapan Sistem Aplikasi pengelolaan kepegawaian(SAPK) ini karena informasi teknis serta manfaat yang dihasilkan tentang Sistem ini belum tersampaikan secara Efektif dan menyeluruh kepada para pegawai yang ada di BKD Povinsi sulawesi tengah. Kemudian peneliti mencermati pegawai yang ada di BKD kurang aktif untuk meningkatkan pengetahuan karena kurangnya ketertarikan pada penggunaan Aplikasi tersebut karena berbasis computer hal tersebut diakibatkan pengetahuan pegawai terkait pengoprasian computer masih kurang apa lagi aplikasi ini terkoneksi dengan jaringan internet.

Kemudian pernyataan yang sama terkait kemampuan BKD beradaptasi dengan Sistem elektronik atau komputer oleh Ibu Wdya Nova S.Kom mengatakan :

“...Mengenai sistem pelayanan yang berbasis online dengan menggunakan perangkat keras atau komputer ini saya fikir sudah ada yang mampu beradaptasi pada penggunaanya akan tetapi memang belum secara menyeluruh staf atau pegawai kita yang mampu beradaptasi dengan perangkat keras ini sehingga pada pengurusan pelayanan kepegawaian masih ada yang masih

menggunakan cara manual.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat menganalisis bahwa aplikasi tersebut pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2013, pada tahun tahun awal penerapannya belum optimal karena kendala dana dalam pembaharuan aplikasi dan penyediaan perangkat pengolahan data, serta terbatasnya tenaga ahli yang menjadi operator dalam pengolahan data kepegawaian. Sampai saat ini tenaga ahli pengolah data pada BKD Povinsi sulawesi tengah masih kurang sehingga Kassubbag Kepegawaian selalu turun langsung dalam pengolahan data kepegawaian. Dan kendala lainnya yaitu terlambatnya SKPD memberikan atau mentransfer data pegawai pada instansi tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah untuk diolah kedalam system aplikasi pengelolaan kepegawaian(SAPK).

Berdasarkan indicator tentang perangkat keras penulis menyimpulkan bahwa indicator tersebut belum terpenuhi karena pada instansi tersebut jumlah pegawai yang mampu mengoperasikan aplikasi Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian(SAPK) dengan teknologi yang tersedia masih terbatas, sehingga peremajaan data yang seharusnya dilakukan oleh bidang-bidang yang diberikan kewenangan dan bertugas untuk itu jarang dilakukan, sehingga pada mula penerapan Aplikasi sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini pegawai BKD masih kurang beradaptasi, kemudian pengadaan pelatihan kepada staff tentang penggunaan aplikasi tersebut sebagai solusi tidak rutin dilakukan. Akibatnya para pegawai yang ada di BKD Povinsi sulawesi tengah masih menggunakan pola lama dalam melakukan pelayanan kepegawaian.

2. *Software (Perangkat Lunak)*

Para pegawai dapat mengakses alamat *website* tersebut melalui beberapa fasilitas yang disediakan oleh BKD, salah satunya yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Pemberdayaan komputer perangkat keras/ lunak khusus untuk (SAPK) berbasis internet merupakan salah satu program strategis dari BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) telah diterapkan pada BKD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada para pegawai dalam peroses pengurusan Administrasi dan manajemen kepegawaian yang berbasis Online.

Software dibagi menjadi dua macam yaitu software operasi dan software aplikasi. Software operasi merupakan software penerjemah daripada hardware, misalnya program linux, windows 2008, windows 2010, windows XP, dan sebagainya. Sedangkan software aplikasi merupakan program terapan, misalnya operating sistem, database, office yang meliputi word, excel notepad, power point, dan sebagainya. Pengaman perangkat lunak pendukung *komunikasi (E-mail, SMS, teleconference / webcam)*.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Lekasanda S.Kom Kasubbag Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah terkait kemampuan pegawai BKD terkait

melaksanakan sistem yang ada pada aplikasi SAPK.

“...Dalam proses pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian (SAPK) di BKD, sudah dilakukan jauh hari sejak perangkat atau sistem pengelolaan data PNS secara online ini di sosialisasikan oleh BKN, aturan penggunaan aplikasi atau Software SAPK ini sudah jelas perlu adanya integrasi antara bidang-bidang jadi saya pikir kita di BKD Povinsi sulawesi tengah ini sudah terintegrasi secara internal...”

Dari pernyataan Kasubbag Badan Kepegawaian Povinsi sulawesi tengah peneliti memaknai bahwa jika di awal penerapan Sistem ini sudah dilakukan sosialisasi tapi mengapa peneliti masih menemukan pegawai yang masih kurang memahami maksud dan tujuan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian, kemudian peneliti melihat langsung bidang-bidang pelaksana yang masih kurang terintegrasi.

Selanjutnya Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah Povinsi sulawesi tengah Anita Hardaningsih, S.Sos., M.Si juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa :

“...kami telah melakukan sosialisasi tentang penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian ini kepada para pegawai melalui kepala bidangnya masing-masing dengan memberikan user akun dan passwordnya secara online, kami berharap seluruh pegawai BKD bisa produktif dengan pengoprasian aplikasi ini sehingga data PNS yang akan melakukan pengisian data bisa berjalan dengan baik...”

Dari dua informan diatas kita mendapatkan informasi bahwa penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) sudah optimal dengan beberapa bidang yang ada dikantor BKD Povinsi sulawesi tengah, akan tetapi pernyataan yang berbeda dari salah satu informan yaitu Fernando S.Kom selaku Operator SAPK I BKD Provinsi sulawesi tengah mengatakan :

“...Masalah software yang ada pada sistem dalam pengelolaan data pegawai saya kira belum cukup, kerena masih ada beberapa bidang yang kurang berkoordinasi buktinya data yang disajikan dari sistem yang ada tidak factual dengan keadaan pegawai yang akan melakukan pelayanan administrasi...”

Pernyataan yang disampaikan oleh Operator SAPK I BKD Povinsi sulawesi tengah peneliti memahami bahwa tingkat komunikasi antar bidang masih kurang sehingga kolaborasi antar bidang untuk menegelola data yang ada didalam sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian tidak terlihat sehingga mempersulit system elektronik untuk dilaksanakan.

Hal ini di benarkan oleh Widya Nova S.kom Staf PNS Mengatakan:

“...Ada beberapa bidang yang data-datanya yang belum sesuai dengan kondisi pegawai saat ini hal tersebut diakibatkan oleh operator antar bidang yang kurang berkoordinasi terkait pembaharuan data yang ada didalam sistem perangkat (SAPK).Dengan banyaknya updatean yang ada pada perangkat atau software di aplikasi SAPK ini pegawai kesulitan untuk menyesuaikan data-data pegawai negeri sipil...”

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan Oleh Widya S.Kom Staf Operator II SAPK BKD Povinsi sulawesi tengah.

“...terkait perangkat seperti gangguan jaringan, server down atau Error sehingga dapat menghalangi pekerjaan operator dan mengurangi kinerja yang ada di BKD Povinsi sulawesi tengah.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian di BKD Povinsi sulawesi tengah. Berdasarkan sistem perangkat yang digunakan, kemampuan pegawai BKD mengolah data-data pegawai belum *up to date* sekalipun ada pernyataan dari informan telah melakukan sosialisasi tentang Sistem ini, akan tetapi secara faktual dilapangan kondisi penerapannya belum tersosialisasikan dengan baik di berbagai bidang yang ada di BKD povinsi sulawesi tengah mengakibatkan data kepegawaian yang tersedia di dalam aplikasi atau sistem masih belum diperbaharui secara berkala sesuai dengan kondisi real pegawai. Bukti ketidak efektifan Penerapan Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian ini adalah memberikan kewenangan kepada SKPD untuk memperbaharui data pegawainya, padahal tugas untuk melakukan update data pegawai adalah tugas penuh dari BKD Povinsi sulawesi tengah.

3. *Human Resource (Sumberdaya Manusia)*

Merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Ketersediaan SDM yang dibutuhkan adalah para tenaga spesialis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi *programme administrator jaringan*, operator dan tenaga lainnya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya harus cukup. Dengan menganut sistem Elektronik Government, saat ini SDM yang ada telah berkompeten untuk merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis online.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Widya S.Kom Staf Operator SAPK II Badan Kepegawaian Daerah terkait kemampuan para pegawai “...secara individu untuk melakukan pelayanan yang efisien dan produktif dalam menjalankan program dari BKN...”

Berdasarkan observasi penulis, informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data dengan system aplikasi pengelolaan kepegawaian diharapkan Sumber daya manusianya mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing yang dihasilkan akurat, relevan, dan tepat waktu harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Hasil wawancara dengan Sekretaris BKD Povinsi sulawesi tengah Ibu Anita Hardaningsih, S.Sos., M.Si beliau menjelaskan sebagai berikut :

“...Sumberdaya Manusianya sendiri bisa dilihat dari kinerjanya terhadap sistem yang ada di BKD pada saat ini dan pada saat bisa saya katakan bahwa kemampuan dari pegawai disini sudah jauh lebih baik dari yang dulu-dulu

sehingga banyaknya PNS yang ingin melakukan proses administrasi bisa dikondisikan oleh pegawai-pegawai yang ada di bidangnya masing-masing ...”

Hasil wawancara dengan Bapak Lekasanda S.Kom Kasubbag Kepegawaian, mengatakan sebagai berikut :

“...Data Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data dengan sistem aplikasi ini yang di lakukan oleh para pegawai sangat relevan dan tepat waktu, kami bisa memproses dan mencetak SK kenaikan pangkat, SK Mutasi langsung dari aplikasi ini setelah BKN menetapkan Persetujuan Teknis secara digital berdasarkan usul yang kami kirim melalui aplikasi ini. Namun, saat pengusulan, kami harus melakukan peremajaan data PNS terlebih dahulu...”

Kemudian hasil wawancara peneliti bersama Staf PNS BKD Povinsi sulawesi tengah Widya Nova S.Kom mengungkapkan terkait Sumberdaya manusia atau pegawai yang ada di Kantor BKD Povinsi sulawesi tengah.

“...saya fikir apa yang diharapkan dari para pegawai yang ada di kantor BKD ini termasuk saya penerapan Sistem ini harus sesuai dengan apa yang dihasilkan, dengan adanya system seperti ini data kepegawaian bisa lebih mudah untuk diakses oleh para pegawai dan mengetahui data kepegawaiannya secara berkala ...”

Kemampuan organisasi mencapai suatu target dapat menghasilkan output yang positif dan efisien. Begitu pula sebaliknya jika organisasi tidak mampu meningkatkan kualitas para pegawainya maka dapat dikatakan pelaksanaan dari satu program yang dijalankan oleh suatu organisasi belum berhasil.

Terkait produksi Sumberdaya manusia dari penerapan Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian dikantor BKD Povinsi sulawesi tengah Fernando S.Kom Staf operator SAPK II mengatakan :

“...hasil dari penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian ini dapat kita ketahui yaitu sebagai contoh pegawai PNS tidak lagi repot-repot berurusan berkas sana-sini jika ingin mengurus mutasi, Kenaikan Pangkat dll. kita hanya langsung lihat data-data yang dibutuhkan untuk pegawai yang sudah tertera di dalam Aplikasi dan petugas yang di BKD juga tidak sulit lagi mencari data pegawai sudah terakomodir semua datanya dalam satu system...”

4. Data Dan Info

Data dan informasi merupakan bahan utama dalam proses Elektronik Government guna mendukung tujuan penyebar luasan informasi Sistem informasi yang baik dan pengelolaan data yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, transparansi Selain itu, keamanan data dan informasi juga menjadi faktor krusial dalam menghindari potensi pelanggaran atau penyalahgunaan informasi.

“...Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Widya S.Kom. operator SAPK I Badan Kepegawaian Daerah hasil yang kami harapkan dari penggunaan aplikasi ini agar data kepegawaian dapat termanajemen dengan baik karena selama ini

data kepegawaian yang ada di BKD ini masih perlu dibenahi sehingga jika ada pegawai yang akan melakukan pelayanan bisa lebih mudah mengakses data-data pegawai tersebut...”

Hasil wawancara dengan Sekretaris BKD Povinsi sulawesi tengah Ibu Anita Hardaningsih, S.Sos., M.Si beliau menjelaskan sebagai berikut

“...Data dan Informasi yang dihasilkan dari program SAPK pengelolaan Sistem tersebut dalam bentuk laporan. Laporan itu menyangkut data kepegawaian mulai dari daftar riwayat hidup, nomor pokok, perekrutan sampai pensiun, diberhentikan atau meninggal dunia, dan lain- lain pokoknya informasi mengenai kepegawaian...”

Hasil wawancara dengan Widya Nova Staf PNS Kantor BKD, mengatakan sebagai berikut:

“...Data Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data dengan sistem aplikasi ini sangat relevan dan tepat waktu, kami bisa memproses dan mencetak SK kenaikan pangkat, SK Mutasi langsung dari aplikasi ini setelah BKN menetapkan Persetujuan Teknis secara digital berdasarkan usul yang kami kirim melalui aplikasi ini. Namun, saat pengusulan, kami harus melakukan peremajaan data PNS terlebih dahulu...”

Kemudian hasil wawancara peneliti bersama Bapak Lekasanda S.Kom Kasubbag Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Povinsi sulawesi tengah mengungkapkan terkait hasil dari data dan info penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian :

“...saya fikir apa yang diharapkan dari penerapan Sistem ini harus sesuai dengan apa yang dihasilkan, dengan adanya system seperti ini data atau informasi kepegawaian bisa lebih mudah untuk diakses oleh para pegawai dan mengetahui data kepegawaiannya secara berkala ...”

Kemampuan organisasi mencapai suatu target dapat menghasilkan output yang positif dan efisien. Begitu pula sebaliknya jika organisasi tidak mampu meningkatkan kualitas produksi maka dapat dikatakan pelaksanaan dari satu program yang dijalankan oleh suatu organisasi belum berhasil.

Terkait dari data dan informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Aplikasi pengelolaan Kepegawaian SAPK dikantor BKD Povinsi sulawesi tengah Bapak Fernando S.Kom Operator SAPK II mengatakan :

“...hasil dari penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian(SAPK) ini dapat kita ketahui yaitu sebagai contoh pegawai PNS tidak lagi repot-repot berurusan berkas sana-sini jika ingin mengurus Kenaikan pangkat,SK Pensiunan, mutasi DLL, kita hanya langsung lihat data-data yang dibutuhkan untuk Pelayanan pegawai yang sudah tertera di dalam Aplikasi dan petugas yang di BKD juga tidak sulit lagi mencari data pegawai kerana sudah terakomodir semua datanya dalam satu system...”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui efektivitas penerapan system aplikasi pengelolaan kepegawaian

pada BKD Povinsi sulawesi tengah berdasarkan kriteria produksi yaitu terkait dengan kualitas dan kuantitas informasi yang dihasilkan dari pengolahan data pegawai dengan memanfaatkan sebuah system menunjukkan bahwa pemanfaatan Aplikasi tersebut belum cukup efektif.

Hemat peneliti dari hasil temuan lapangan bahwa output yang dihasilkan BKD dalam menjalankan system Administrasi Pelayanan kepegawaian yang berbasis online ini masih belum sesuai harapan karena informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data kepegawaian belum akurat, dan relevan. Sistem ini belum sepenuhnya memberikan data yang aktual dikarenakan ada beberapa bidang yang masih kurang melakukan *up date* data pegawai seperti data diri pegawai, penilaian kinerja, serta status jabatan PNS. Sehingga dalam proses produksi data yang dihasilkan dari Sistem aplikasi pengelolaan kepegawaian, hanya sebatas kebutuhan seperti kenaikan pangkat Pensiun dan mutasi. Hal ini masih jauh dari harapan secara keseluruhan dan *up to date* data dan info kepegawaian yang semestinya harus ditampilkan dalam bentuk informasi data kepegawaian yang lebih lengkap.

5. Struktur Organisasi

Prosedur ini meliputi kegiatan penyusunan aplikasi Elektronik Government, pengumpulan, pengolahan, dan pelaksanaan Penerapan Elektronik Government mempunyai landasan yang cukup untuk merealisasikannya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Anita Hardaningsih, S.Sos., M.Si Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Povinsi sulawesi tengah terkait struktur organisasi dalam pelayanan data para PNS yang ada dalam aplikasi SAPK.

“...Untuk sekarang tatanan struktur yang ada di BKD saat ini menurut saya sudah bisa dibilang fleksibel dengan adaptasi yang di lakukan para pegawai dalam melaksanakan pelayanan terhadap para PNS sehingga dapat mengefisienkan waktu dan di bantu dengan adanya aplikasi SAPK untuk melakukan pelayanan. ...”

Dalam mencapai hasil dari struktur yang sudah disusun dari sebuah pelaksanaan kegiatan organisasi sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja daya dukung proses pencapaian tujuan sebuah organisasi Bapak Leksanda S.Kom Kasubbag Kepegawaian BKD Povinsi sulawesi tengah mengatakan :

“...Pelaksanaan fungsi dari struktur yang sudah ada pada saat ini yang ditunjang juga dengan para sumberdaya manusianya sudah efisien dalam menjalankan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dengan aturan yang sudah ada dan dengan sistem yang sudah ditentukan...”

Bapak Fernando S.Kom Operator SAPK I menyampaikan terkait dengan struktur yang ada :

“...Masih ada beberapa struktur yang ada di BKD ini yang harus terus di kembangkan dalam hal individu para pegawainya yang kurang responsif dalam hal perubahan sistem atau upgrading sistem pelayanan yang ada...”

Kemudian pernyataan tersebut dibenarkan oleh informan selanjutnya yaitu Ibu

Widya S.Kom menyampaikan bahwa :

“...Setiap struktur yang ada di sini punya fungsi dan wewenang masing-masing dalam menjalankan tugasnya dengan baik taapi kurangnya komunikasi antar devisi maka tidak menutup kemungkinan terjadi misskomunikasi pada saat melaksanakan pelayanan yang ada...”

Kurangnya kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif dapat menyebabkan kebingungan di antara pegawai yang ada. Misalnya, instruksi yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat mengarah pada pelaksanaan tugas yang salah.

Berikut pernyataan dari Ibu Widya Nova S.Kom Staf PNS di BKD Povinsi sulawesi tengah mengatakan :

“...Struktur yang fleksibel dan dapat beradaptasi untuk mengatasi perubahan dalam etos kerja pegawai yang lebih efektif dalam melaksanakan pelayanan tuntutan pegawai. Kemampuan pegawai untuk berubah dapat mendukung inovasi dan efisiensi...”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta melihat kondisi langsung di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa Struktur Organisasi yang ada pada saat ini digunakan sebagai tolak ukur dalam proses penerapan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian di BKD povinsi sulawesi tengah dilihat dari jawaban informan mengatakan Sudah cukup baik dalam struktur yang ada dalam mendukung pelayanan pegawai dan selalu melakukan improvisasi terhadap kualitas di setiap devisi yang ada.

6. Komunikasi

Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah, berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan dengan kebijakan Elektronik Government. Proses komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk perintah, arahan dan penjelasan melalui forum rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, pelatihan atau bentuk pertemuan lainnya. Tujuannya adalah membangun perspesi yang sama antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaannya. Proses komunikasi dapat dikatakan berhasil mana kala para pelaksana memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman bidang Elektronik Government.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Widya S.Kom Operator SAPK II Badan Kepegawaian Daerah terkait kemampuan para pegawai BKD dalam melakukan komunikasi terkait melaksanakan sistem yang ada pada aplikasi SAPK.

“...Kalau bicara soal kemampuan staf yang ada dikantor BKD dalam saling berkomunikasi antar devisi saya pikir sudah sangat baik dalam melaksanakan pelayanan SAPK ini dan kami juga sangat terbuka buat para PNS yang ingin mengurus berkas atau data kepegawaiannya...”

Kemampuan pegawai berkomunikasi sangat diperlukan kerana kondisi dan lingkungan organisasi selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Dalam hal penerapan SAPK ini diharapkan bisa lebih meringankan pekerjaan

pemerintah dalam mengelola data-data pegawai agar lebih efektif dan efisien.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Lekasanda S.Kom, Kasubbag Kepegawaian menjelaskan sebagai berikut :

“...SAPK ini kan adalah sistem informasi untuk mengolah data pegawai menggunakan perangkat teknologi, sejak tahun 2013, sistem ini sudah dikelola oleh operator yang ada di kantor BKD, sehingga dibutuhkan pegawai yang bisa berinteraksi dan komunikasi yang baik untuk pengelolah data menggunakan perangkat lunak dan keras, kalau untuk berkomunikasi saya kira sudah sangatlah cukup ...”

Akan tetapi pendapat yang berbeda muncul dari ibu Anita Hardaningsih, S.Sos., M.Si Sekretariat BKD Povinsi sulawesi tengah mengatakan :

“...Kami sudah mulai menggunakan aplikasi SAPK ini memang dari tahun 2013 sehingga sistem ini sangat membantu dalam pengolahan data pegawai. Namun selalu ada pembaharuan di setiap tahunnya dan pasti pegawai harus selalu evaluasi, komunikasi yang baik makanya di butuhkan komunikasi yang intens dalam melaksanakan pelayanan terhadap PNS, kemudian Kendala lainnya yaitu terlambatnya SKPD dalam pemberian data pegawainya ke kami akibat kurangnya komunikasi...”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Widya Nova S.Kom Staf PNS BKD Povinsi sulawesi tengah menjelaskan sebagai berikut :

“...Sejak SAPK di terapkan masih ada kendala dalam penerapannya salah satunya yaitu Komunikasi antar pegawai yang masih kurang berinteraksi untuk pelayanan yang lebih efektif saya rasa di BKD ini masih ada beberapa pegawai yang kurang umpan balik atau *Feedback* dalam pelayanan...”

Pernyataan informan diatas memberikan gambaran bahwa Kekurang mampuan pegawai untuk berkomunikasi dalam penerapan SAPK ini karena informasi teknis serta kurangnya sosialisasi bahwa pentingnya komunikasi dalam penerapan SAPK ini. Kemudian peneliti mencermati pegawai yang ada di BKD kurang aktif untuk meningkatkan kualitas kerja mereka.

Kemudian pernyataan yang sama terkait kemampuan pegawai BKD untuk berkomunikasi beradaptasi dengan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian oleh Operator SAPK I bapak Fernando S.Kom mengatakan :

“...Kalau bicara soal berkomunikasi beradaptasi yang selalu di tingkatkan kualitasnya dengan sistem pelayanan yang berbasis online ini saya fikir sudah ada yang mampu beradaptasi dengan komunikasi yang ada pada penggunaanya akan tetapi memang belum secara menyeluruh staf atau pegawai kita yang mampu sehingga pada pengurusan pelayanan kepegawaian masih ada yang selalu misskomunikasi...”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis maka penulis dapat menganalisis bahwa aplikasi tersebut pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2013, pada tahun tahun awal penerapan SAPK belum optimal karena kendala komunikasi berbagai pihak yang

bersangkutan antara pihak BKD dan para PNS serta setiap tahunnya selalu ada peningkatan atau evaluasi terhadap aplikasi dan penyediaan perangkat pengolahan data, Sampai saat ini tenaga ahli pengolah data pada BKD Povinsi sulawesi tengah. masih kurang sehingga kepala Bidang Informasi Kepegawaian selalu turun langsung dalam pengolahan data kepegawaian. Dan kendala lainnya yaitu terlambatnya SKPD memberikan atau mentransfer data pegawai pada instansi tersebut akibat kurangnya komunikasi ke Badan Kepegawaian Daerah untuk diolah.

7. Sikap para pelaksana

Idealnya setiap kebijakan direspon dengan baik oleh para pelaksananya. Ada tidaknya respon pelaksana ini dapat dilihat dari aktivitasnya. Apabila para pelaksana mengimplementasikan kebijakan Elektronik Government secara konsisten maka respon positif. Instansi atau personel lainnya yang diposisikan sebagai pelanggan, dapat diukur tingkat kepuasannya terhadap produk-produk Elektronik Government, seperti produk pusat data, aplikasi pendukung pekerjaan kantor, aplikasi pelayanan publik, email, SMS dan produk-produk lainnya.

Berikut Hasil wawancara dengan Bapak Lekasanda S.Kom Kasubbag Kepegawaian BKD terkait Sikap para pelaksana atau kemampuan pegawai secara individu dan konteks kerja dalam pelayanan dan pengembangan sistem yang ada pada aplikasi SAPK.

“...Dalam proses integrasi sikap para pelaksana program aplikasi SAPK di BKD, sudah dilakukan jauh hari sejak aplikasi ini di sosialisasikan oleh BKN, aturan penggunaan aplikasi sudah jelas perlu adanya integrasi antara bidang-bidang jadi saya fikir kita di BKD Povinsi sulawesi tengah ini para pelaksananya sudah terintegrasi dengan baik...”

Dari pernyataan Kasubbag Kepegawaian Povinsi sulawesi tengah peneliti memaknai bahwa jika di awal penerapan SAPK ini sudah dilakukan sosialisasi akan tetapi mengapa peneliti masih menemukan pegawai yang masih kurang memahami maksud dan tujuan SAPK ini, kemudian peneliti melihat langsung bidang-bidang pelaksana yang masih kurang maksimal.

Selanjutnya Pak Fernando S.Kom Operator SAPK I juga mengatakan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa :

“...Antusias para pegawai dalam meningkatkan kualitas kerja pada sistem SAPK ini dalam melakukan pelayanan kami telah melakukan sosialisasi tentang penerapan SAPK kepada para pegawai melalui kepala bidangnya masing-masing dengan memberikan user akun dan passwordnya, kami berharap seluruh pegawai BKD bisa proaktif dengan aplikasi ini sehingga data PNS bisa terintegrasi dengan baik...”

Dari dua informan diatas kita mendapatkan informasi bahwa penerapan SAPK ini para pegawai atau pelaksana sistem aplikasi pelayanan kepegawaian ini(SAPK) sudah terintegrasi dengan beberapa bidang yang ada dikantor BKD Povinsi sulawesi tengah, akan tetapi pernyataan yang berbeda meyangkut Sikap para pelaksana timbul

dari salah satu informan yaitu Ibu Anita Hardaningsih, S.Sos., M.Si selaku Sekretariat BKD Povinsi sulawesi tengah mengatakan :

“...Masalah sikap pelaksana Program SAPK ini dalam pengelolaan data pegawai saya kira belum karena masih ada beberapa bidang yang kurang responsif untuk berkoordinasi buktinya data yang disajikan tidak factual dengan keadaan pegawai...”

Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretariat BKD peneliti memahami bahwa tingkat respon para pegawai antar bidang masih kurang sehingga kolaborasi antar bidang untuk mengelola SAPK ini tidak terlihat.

Hal ini di benarkan oleh Staf PNS BKD Widya Nova S.Kom Mengatakan

“...tanggapan para pegawai tentang program SAPK ini ada beberapa bidang yang data-datanya yang belum sesuai dengan kondisi pegawai saat ini hal tersebut diakibatkan oleh operator antar bidang yang kurang merespon hal update dalam sistem SAPK ini,terkait pembaharuan data pegawai yang masih terkesan mengabaikan pengiriman data-data pegawai yang ada di SKPDnya sehingga kita di BKD ini juga kesulitan untuk menyesuaikan data-data pegawai...”

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan Oleh ibu Widya S.Kom terkait Respon tanggapan para pegawai sebagai bentuk terintegrasinya BKD dengan SKPD yang ada di povinsi sulawesi tengahsebagai bentuk komunikasi beliau mengatakan :

“...sosialisasi SAPK yang dilakukan BKD Povinsi sulawesi tengah untuk melihat respon para pegawai sudah dilakukan bahkan kemarin kami memberikan arahan dan kewenangan kepada SKPD untuk mengakses Aplikasi SAPK dengan harapan agar respon pegawai lebih efektif serta data pegawai yang tersedia didalam aplikasi ini bisa lebih actual sesuai dengan kondisi pegawai yang ada di SKPD masing-masing...”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan untuk mengetahui Respon para pengguna dari penerapan SAPK di BKD Povinsi sulawesi tengah. kemampuan pegawai BKD mengelolah data-data pegawai belum *update* sekalipun ada pernyataan dari informan telah melakukan sosialisasi tentang SAPK kepada pegawainya, akan tetapi secara faktual dilapangan kondisi penerapan SAPK ini belum terealisasikan dengan baik di berbagai bidang yang ada di BKD povinsi sulawesi tengah mengakibatkan data kepegawaian yang tersedia di dalam aplikasi masih belum diperbaharui secara berkala.

Kesimpulan

Pada kenyataannya untuk mengukur elektronik government penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi tengah penulis menggunakan tujuh kriteria yaitu Hardware, Software, *Human Resource* (Sumber daya manusia),Data dan Info,Stuktur Organisasi,Komunikasi dan Sikap Para Pelaksana. penerapan sistem aplikasi

pengelolaan kepegawaian (SAPK) ini belum bisa dikatakan efektif ditinjau dari tujuh kriteria diantaranya: Ada beberapa kriteria yang belum efektif dalam penerapannya adalah: Pada kriteria pertama *Hardware*. Dalam pelayanan kepegawaian bahwa indikator tersebut belum terpenuhi karena pada instansi tersebut jumlah pegawai yang mampu mengoperasikan (SAPK) dengan teknologi yang masih terbatas. *Software*: Berdasarkan system pelayanan pada (SAPK) pihak BKD telah melakukan sosialisasi tentang Sistem ini, akan tetapi kondisi penerapannya belum tersosialisasikan dengan baik. *Data dan Info*: Yang dihasilkan BKD dalam menjalankan system Administrasi Pelayanan kepegawaian yang berbasis online ini masih belum sesuai karena informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data kepegawaian belum akurat dan relevan. *Komunikasi*: Hasil wawancara dan observasi bahwa aplikasi tersebut pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal karena kendala komunikasi pada kantor BKD. *Sikap para pelaksana*: Respon pegawai pernyataan dari informan telah melakukan sosialisasi tentang (SAPK) kepada pegawainya.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian ini yang telah diutarakan sebelumnya, maka saran yang dapat kemukakan sebagai berikut:

1. Pegawai Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi tengah Harus mampu beradaptasi dengan kondisi baru yang terus *update* pada system yang telah terapkan dalam mengelolah data-data pegawai (SAPK) agar manajemen data kepegawaian bisa lebih baik serta efektif dan efisien.
2. Demi mendukung kemajuan hasil dari proses penerapan elektronik government penggunaan Aplikasi SAPK ini diharapkan kerja sama antar bidang sosialisasi ke kantor BKD yang ada didaerah lebih ditingkatkan lagi mengingat kesuksesan dari penerapan sebuah system tergantung pada proses kerja sama dan hubungan antara bidang yang ada di sebuah instansi pemerintah.
3. Kepala badan seharusnya mampu memberikan motivasi kepada para pelaksana program agar pencapaian tujuan dari penerapan elektronik government SAPK ini di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi tengah. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana sebagai bentuk dukungan dalam peroses penerapan SAPK yang efektif dan Efisien.

Referensi

- Abdul, Wahab, S. (2012). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara.
- A Muir, C. (n.d.). *Oppenheim Journal of information science*. 28 (3), 173–186.
- Anwar. (2003). *Ada empat hal yang menjadi peran dan diterapkannya Elektronik Government*. 19.
- Attahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Egovernment: Studi Kasus Aplikasi Ogan Logion Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesian*, 3(1), 66–68.
- (Shafira, A., & Kurniaswi, A. (2021). IMPLEMENTASI ELEKTRONIK GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN KULON PROGO. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 52-68.
- Baculu, V. Ai. (2019). *Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik government di Kabupaten Buol berdasarkan peraturan Presiden No 16 Tahun 2018*.
- Basrowi, dan S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT Rineka Cipta.
- Herlina. (2019). *Penerapan Elektronik Government melalui program pindu (pusat pelayanan informasi dan pengaduan) kabupaten pinrang*.
- Heriyanto, H. (2022). *Urgensi Penerapan Elektronik Government Dalam Pelayanan Publik*. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066-075.
<https://www.bkn.go.id/>
<https://bkd.sultengprovinsi.sulawesi.tengahgo.id>
- Indrajit, R, E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan*.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic*. Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008). *Undang-undang Nomor 11*.
- Islamy, M. irfan. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Miles, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Ui Press.
- Moelong Lexy, J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, I. (2009). *Publik Policy. National information policy developments worldwide I: electronic government*. (n.d.).
- Noviana, R. D. (2012). Manajemen Elektronik Government Berbasis Web Model Government to Citizen (G2C) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3).
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy Analisis strategi advokasi teori dan praktek*. Putra Media Nusantara.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2010 tentang *Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On-Line (SAPK On-Line)*.
- Peraturan Kepala BKN. (2008). *Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan*

- Kepegawaian (SAPK). Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015. (2015). Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015.*
- Perka-Bkn-Nomor-14-Tahun-2011-Pedoman-Pengembangan-Database-Pns
- Pramusinto, A. (2009). *Governance Reform di Indonesia*. Gava Media.
- Purwanto, E Agus & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan publik Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rianto, B. E. L. T. L. (2012). *Aplikasi Electronic Government dalam Pelayanan Publik*. Cv Putra Media Nusantara (PMN).
- Rianto dan Lestari (2010;38) *Aspek Penerapan Elektronik Government*
- Satori, D, dan K. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfa Beta.
- Sharon S.Dawes (2008) *The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance*
- Subarsono, A. . (2005). *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfa Beta.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Memahami Good Governance dalam prespektif sumber daya manusia*. Gava Media.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Wahida, N. (2016). *Penerapan Egovernment di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang (Skripsi, Universitas Hasanuddin)*.
- Wasistiono, S. & T. (2006). *Prospek pembangunan desa*. Focus Media.